

Tabel 6.1.
Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
MISI 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan	1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja	1. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	1. Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, <i>job fair</i> , magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta keterampilan tenaga kerja	1. Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan untuk menciptakan tenaga kerja mandiri dan produktif	√	√	√	√	√
				2. Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa	√	√	√	√	√
			4. Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, untuk melakukan usaha produktif	√	√	√	√	√
			5. Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri	Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru	√	√	√	√	√	
			2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	√	√	√	√	√	
	2. Meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan	1. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	1. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	√	√	√	√	√
				2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019	
			2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	1. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah	√	√	√	√	√	
				2. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.	√	√	√	√	√	
				3. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (<i>bridging program</i>) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi	√	√	√	√	√	
		2. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	1. Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD	1. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu	√	√	√	√	√	
				2. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan	√	√	√	√	√	
				3. Peningkatan akses PAUD	√	√	√	√	√	
		3. Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	2. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	1. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	√	√	√	√	√	
				2. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas	√	√	√	√	√	
				3. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi	√	√	√	√	√	
				4. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta	√	√	√	√	√	
				3. Meningkatkan minat baca masyarakat	Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu	√	√	√	√	√
		4. Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	1. Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	√	√	√	√	√	
				2. Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	√	√	√	√	√
		3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata	1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar	√	√	√	√	√
				3. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
		2. Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal	1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif dan preventif, tanpa mengenyampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif	√	√	√	√	√
		4. Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses pelayanan kesehatan	√	√	√	√	√
		5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi	Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program KB untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga	√	√	√	√	√
	4. Mempercepat dan memperluas penanggulangan kemiskinan	1. Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan	1. Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar-sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu ("lokus-fokus")	1. Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program	√	√	√	√	√
2. Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin				√	√	√	√	√	
3. Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin				√	√	√	√	√	
			2. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (Kube)	Peningkatan kualitas manajemen Kube yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun ekonomi	√	√	√	√	√
			4. Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN								
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019			
			5. Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	1. Peningkatan perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah	√	√	√	√	√			
				2. Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin	√	√	√	√	√			
		2. Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	√	√	√	√	√			
		3. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	√	√	√	√	√			
MISI 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi	1. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi	1. Meningkatnya volume usaha UMKM, dan kualitas kelembagaan koperasi	1. Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-perbankan	1. Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah, lembaga keuangan bank dan non-bank, mengutamakan pendampingan kepada UMKM untuk kelancaran pembiayaan usaha	√	√	√	√	√			
				2. Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>	√	√	√	√	√			
				3. Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM dan bank pelaksana lainnya di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan bagi UMKM	√	√	√	√	√			
						2. Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	1. Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran	√	√	√	√	√
							2. Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi	√	√	√	√	√
							3. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional	√	√	√	√	√
							4. Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai	√	√	√	√	√
							5. Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil	√	√	√	√	√
							6. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi, termasuk Kopwan dan Koppontren.	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
		2. Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)	Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk menanggulangi feminisasi kemiskinan	1. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan 2. Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan 3. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan 4. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan	√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian	1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan)	1. Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	Penetapan dan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	√	√	√	√	√
			3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan	√	√	√	√	√
			4. Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan	√	√	√	√	√
		2. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1. Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1. Peningkatan nilai tambah (<i>value added</i>) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yang memiliki keterkaitan ke belakang (<i>backward linkage</i>) dan ke depan (<i>forward linkage</i>) pada sebaran lokasi potensial yang merata 2. Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian lokal yang dapat menyerap tenaga kerja	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan yang terstandarisasi	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan	√	√	√	√	√
	3. Meningkatkan ketahanan pangan	1. Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (<i>food availability</i>)	Meningkatkan stok pangan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
		2. Meningkatnya penyerapan pangan (<i>food utilization</i>)	1. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan	Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan penanganan keamanan pangan	Pengembangan pengawasan keamanan pangan	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya akses pangan (<i>food acces</i>)	1. Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	1. Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan	√	√	√	√	√
				2. Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat	√	√	√	√	√
				3. Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan	√	√	√	√	√
			2. Menjaga stabilitas harga pangan	Pengendalian harga pangan pokok, dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)	√	√	√	√	√
	4. Meningkatkan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	1. Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	1. Revitalisasi Puspa Agro menjadi <i>trading house</i> produk pertanian Jawa Timur	√	√	√	√	√
				2. Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional	√	√	√	√	√
			3. Peningkatan performa standarisasi Industri	√	√	√	√	√	
	5. Meningkatkan percepatan kinerja sektor industri	Meningkatnya kontribusi sektor industri	1. Meningkatkan pengembangan sektor industri	1. Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi	√	√	√	√	√
				2. Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar, serta mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil	√	√	√	√	√
3. Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro				√	√	√	√	√	
			2. Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor	√	√	√	√	√
6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata	1. Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	1. Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan	√	√	√	√	√	
			2. Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional	√	√	√	√	√	
			3. Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata	√	√	√	√	√	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
				4. Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing	√	√	√	√	√
				5. Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat	√	√	√	√	√
				6. Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar	√	√	√	√	√
		2. Meningkatkan kualitas seni budaya lokal	Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	1. Peningkatan penyelenggaraan festival seni budaya lokal pada event nasional dan internasional	√	√	√	√	√
				2. Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal	√	√	√	√	√
				3. Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air	√	√	√	√	√
	7. Meningkatkan kinerja penanaman modal dalam dan luar negeri, serta investasi daerah	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah	1. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	1. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA	√	√	√	√	√
				2. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional	√	√	√	√	√
	8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat	1. Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara	1. Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	1. Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota	√	√	√	√	√
				2. Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya	√	√	√	√	√
				3. Pengembangan jalur komuter perkeretaapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (double track)	√	√	√	√	√
				4. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	1. Pengembangan terminal tipe A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas	√	√	√	√	√
				2. Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
				3. Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus	√	√	√	√	√
				4. Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang	√	√	√	√	√
				5. Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara pengumpan untuk penerbangan antar-kota (city link)	√	√	√	√	√
				6. Pengembangan perluasan sistem angkutan umum, termasuk busway/monorel	√	√	√	√	√
		2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi	1. Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dengan harga terjangkau serta sanitasi yang layak	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air baku melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1. Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam, dan embung	√	√	√	√	√
				2. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) dan sumber air	√	√	√	√	√
				3. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun	√	√	√	√	√
			2. Mengendalikan daya rusak air, serta pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat	1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan antara lain melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.	√	√	√	√	√
				2. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan	√	√	√	√	√
				3. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)	√	√	√	√	√
				4. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan	√	√	√	√	√
		4. Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	1. Meningkatkan infrastruktur dan ketersediaan energy dan ketenagalistrikan	1. Peningkatan koordinasi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan pengelolaan pertambangan/ SD Mineral dan Migas	2. Peningkatan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan Migas	√	√	√	√	√
			3. Meningkatkan pengelolaan air tanah	3. Peningkatan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah	√	√	√	√	√

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019	
			4. Meningkatkan penelitian dan pengembangan SD geologi lingkungan dan bencana geologi	4. Peningkatan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan dan Early Warning System (EWS) bencana geologi	√	√	√	√	√	
		5. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	√	√	√	√	√	
MISI 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan pemeliharaan kelestariannya	1. Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi	Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek	√	√	√	√	√	
		2. Meningkatnya sumber daya air terkonservasi	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	1. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasokan sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga air irigasi pertanian rakyat	√	√	√	√	√	
				2. Pengembangan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani	√	√	√	√	√	
		3. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumber daya air, DAS, dan wilayah pesisir, serta laut	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir, dan laut	1. Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup	√	√	√	√	√
	2. Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, merehabilitasi ekosistem yang rusak, serta menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut				√	√	√	√	√	
	Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders), serta menggali dan mengembangkan modal sosial, merevitalisasi peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian				√	√	√	√	√	
	2. Meningkatkan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan	1. Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang		1. Mengembangkan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	1. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah	√	√	√	√	√
				2. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	2. Fasilitasi Upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur	√	√	√	√	√
				3. Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang	√	√	√	√	√
				4. Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	4. Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	√	√	√	√	√
	2. Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian		Menetapkan dan mempertahankan luasan LP2B dalam rangka swasembada beras	Peningkatan fasilitasi upaya mendorong luasan LP2B dalam rangka swasembada beras	√	√	√	√	√	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
MISI 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), dan bersih (<i>clean government</i>), serta profesionalisme pelayanan publik	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan manajemen Aparatur Sipil Negara secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik	√	√	√	√	√
		2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat	√	√	√	√	√
				Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	√	√	√	√	√
			2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan <i>up to date</i>	√	√	√	√	√
		3. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD	√	√	√	√	√
		4. Meningkatkan peran DPRD sesuai dengan fungsinya	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan	√	√	√	√	√
		5. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu	√	√	√	√	√
		6. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1. Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif	√	√	√	√	√
		7. Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	1. Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsif, transparan dan akuntabel.	√	√	√	√	√
	2. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	√	√	√	√	√		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019	
				Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam	√	√	√	√	√	
			3. Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)	Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana	√	√	√	√	√	
MISI 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial	1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar-umat beragama	1. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan	Meningkatkan fasilitas layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	1. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.	√	√	√	√	√	
				2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing	√	√	√	√	√	
		2. Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	1. Peningkatan dan penguatan kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati	√	√	√	√	√	
				2. Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi	√	√	√	√	√	
				3. Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan	√	√	√	√	√	
		2. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	1. Memelihara kewaspadaan nasional untuk menangkal upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme	√	√	√	√	√
	2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas				Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme <i>community policing</i>	√	√	√	√	√
	3. Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan				Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur	√	√	√	√	√
	3. Meningkatkan penguatan kearifan lokal (<i>local wisdom</i>)	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas	√	√	√	√	√	
				Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat	√	√	√	√	√	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				PERNYATAAN	2015	2016	2017	2018	2019
	4. Meningkatkan penegakan supremasi hukum, dan penghormatan hak azasi manusia (HAM) yang berkeadilan	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum	√	√	√	√	√
				Mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum	√	√	√	√	√
		2. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supremasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM	Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	√	√	√	√	√
		3. Meningkatnya penguatan <i>civil society</i> dalam bidang hukum dan HAM	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan <i>civil society</i>	√	√	√	√	√